



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian mengenai Konstruksi Realitas Pemberitaan Sidang Setya Novanto Terkait Kasus KTP-el pada Metro TV dan TV One penulis lakukan karena dugaan korupsi proyek ini sungguh besar, yakni Rp 2,3 Triliun.

Proyek korupsi tersebut dinilai besar dan dilakukan “berjamaah” karena menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 70 nama termasuk pejabat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Penyelidik Keuangan, Perusahaan BUMN, dan pihak swasta), politikus (anggota/mantan anggota DPR dari tujuh fraksi, yakni Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PPP, PKS, Gerindra, dan Hanura) menteri, hingga kepala daerah diduga ikut menerima suap dari mega proyek tersebut. (*Katadata.co.id*, 11 Maret 2017).

Selain itu, kasus yang menyeret mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto ini juga menjadi alasan peneliti menjadikannya sebagai objek kajian skripsi. Pasalnya, Novanto merupakan pejabat negara yang memiliki nama besar. Sejatinya, ia harus menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. Kasus ini juga dinilai peneliti aktual lantaran hingga kini KPK masih mendalami orang-orang yang terlibat korupsi KTP-el.

Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Penetapan Setya Novanto berawal dari penyelidikan oleh KPK terhadap sejumlah tersangka, di antaranya anggota DPR Fraksi Demokrat Muhammad Nazaruddin pada tahun 2013, Direktur Pengelolaan Informasi Kemendagri Sugiharto (2014), Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman (2016), pengusaha Andi Narogong (2017), anggota DPR Komisi II fraksi Hanura Miryam S. Haryani, Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan anggota DPR RI fraksi Golkar Markus Nari (2017) (*Tempo.co*, 24 April 2018).

Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Setya Novanto mengajukan banding dan pada 29 September ia berhasil memenangkan sidang praperadilan yang ia ajukan 4 September 2017. Akan tetapi, KPK kembali menetapkan Setya Novanto menjadi tersangka pada 31 Oktober 2017. Alhasil, Novanto mengajukan sidang praperadilan pada 15 November 2017, tetapi dirinya gagal memenangkan praperadilan dan akhirnya menjalani sidang pertama 13 Desember 2017 (*Jawapos.com*, 24 Maret 2018)

Sementara itu, perjalanan sidang dan berita korupsi KTP Elektronik yang menyangkut Setya Novanto ini juga menjadi sorotan di media massa Indonesia. Berdasarkan data dari Evello, lembaga pemantau media dan media sosial, terdapat 1.682 berita daring selama periode 9 – 16 Januari 2018 tentang persidangan Setya Novanto. Hasilnya, 1.682 berita tersebut telah dibagikan pembaca melalui kanal Facebook sebanyak 193.967 kali (*eveline.co.id*, 16 Januari 2018).

Puncak *share* berita Setya Novanto selama periode pemantauan terjadi pada Rabu, 10 Januari 2018. Jumlah *share* berita pada hari tersebut mencapai 84.049 kali. Media daring *Kompas.com* dan *Liputan6.com* menjadi sumber pemberitaan dengan *share* terbanyak ke Facebook. Dua berita dari *Kompas.com*, masing-masing berjudul Fredrich Yunadi Ditahan KPK Usai Diperiksa 10 jam dibagikan sebanyak 16.025 kali. Sementara berita Pengacara Setya Novanto Pesan Satu Lantai RS Sebelum Kecelakaan dibagikan sebanyak 13.282 kali (*eveline.co.id*, 16 Januari 2018).

Sebelumnya, berdasarkan kajian dari Evello, Partai Golkar pada periode November 2017 menjadi partai yang paling banyak diberitakan media. Terdapat 11.986 komentar, 57.289 *likes*, 69.398 reaksi, dan 3.573 yang membagi berita. Kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto menjadi bagian dari jenis berita yang paling banyak memperoleh tanggapan pengguna Facebook, terutama pelanggan berita melalui kanal *fanpage*. Hal itu ditambah dengan sentimen negatif terhadap Setya Novanto periode 14-21 November 2017. Dari 12 tokoh partai politik, sebanyak 97,3 % media daring memberitakan informasi dengan sentimen negatif tentang Setya Novanto (*eveline.co.id*, 21 November 2017).

Tak ayal, perjalanan kasus ini menjadi pusat perhatian media, salah satunya media televisi. Televisi menjadi medium penyampaian informasi yang paling diminati masyarakat. Berdasarkan survei Nielsen Consumer Media View yang dilakukan di 11 kota di Indonesia pada tahun 2017, penetrasi Televisi masih memimpin dengan 96 persen disusul dengan Media

Luar Ruang (53%), internet (44%), Radio (37%), Koran (7%), Tabloid dan Majalah (3%) (*Nielsen.com*, 26 Juli 2017).

Maka dari itu, menurut Jati dalam artikel jurnal “Membayangkan Indonesia Baru”, efek atau penetrasi dari televisi memiliki andil yang besar terhadap pandangan masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan fenomena politik yang berkembang di Indonesia saat ini, peristiwa dikonstruksi, dibangun, dan digambarkan sebagai sesuatu yang baik. Implikasinya adalah realita berupa informasi sendiri disampaikan secara *second hand* sehingga publik pun menerima informasi yang telah direkayasa sepenuhnya hanya demi menaikkan citra dan pamor (Jati, 2014, p. 23).

Berdasarkan hasil survei dari PEW Research Center di 38 negara, termasuk Indonesia pada 11 Januari 2018, publik sangat setuju bahwa media tidak memberikan informasi yang bias pada liputan tentang politik. Survei yang menampilkan perilaku media tersebut terbagi menjadi empat sektor, yakni tentang keadilan dalam berita politik, pemimpin dan pejabat pemerintahan, keakuratan berita, dan peristiwa berita yang paling penting (*Pewresearch.org*, 11 Januari 2018).

Menurut data *Pewresearch.org*, 11 Januari 2018, Masyarakat Indonesia percaya bahwa :

- a) 77 persen media di Indonesia sudah adil dalam menyampaikan berita politik

- b) 85 persen media sudah bagus dalam menyampaikan berita mengenai pemimpin dan pejabatan pemerintahan
- c) 85 persen sudah akurat
- d) Dan 89 persen sudah baik dalam menyampaikan berita yang paling penting.

Akan tetapi, bias informasi yang terjadi di Indonesia pelik terjadi lantaran kepentingan kelompok atau pemilik medianya. Framing yang dilakukan melalui konstruksi realita bukan hanya berkaitan dengan skema individu (wartawan), melainkan juga berhubungan dengan proses produksi berita-kerangka kerja dan rutinitas organisasi media. Bagaimana peristiwa dibingkai, kenapa peristiwa dipahammi dalam kerangka tertentu atau bingkai tertentu, tidak dibingkai yang lain, bukan semata-mata disebabkan oleh struktur skema wartawan, melainkan juga rutinitas kerja dan institusi media yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemaknaan peristiwa (Eriyanto, 2001, p. 115).

Melihat fenomena pemberitaan tersebut, maka penulis mengambil dua objek media televisi, yakni Metro TV dan TV One untuk diteliti tentang konstruksi realita yang kedua televisi swasta tersebut lakukan. Tercatat Metro TV dan TV One merupakan media besar yang memiliki afiliasi dengan partai politik, TV One merupakan bagian dari Viva News Group yang dimiliki Aburizal Bakrie selaku petinggi partai Golkar dan Metro TV merupakan bagian dari Media Group yang dimiliki oleh Surya Paloh selaku petinggi Nasional Demokrat atau Nasdem.

Penulis hendak meneliti apakah media yang memiliki afiliasi politik ini memiliki keberpihakan atau tidak. Mengingat Setya Novanto adalah ketua umum Golkar dan diasumsikan pernah dibela TV One ketika kasus “Papa Minta Saham” tahun 2015 silam. Adapun Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh yang pernah memiliki permasalahan dengan Setya Novanto terkait permasalahan serupa di tahun yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana fakta mengenai kasus KTP-el yang menyangkut Setya Novanto dikonstruksi dan kemudian disampaikan kepada masyarakat oleh Metro TV dan TV One dalam program Metro Hari Ini serta Kabar Hari Ini periode Desember 2017-April 2018.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah ada kepentingan pemilik media Metro TV dan TV One dalam mengkonstruksi kasus KTP elektronik yang menyangkut Setya Novanto dalam pemberitaannya di program Metro Hari Ini dan Kabar Hari Ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana Metro TV dan TV One mengkonstruksi berita sidang proyek pengadaan korupsi KTP elektronik yang menyangkut Setya Novanto dalam pengaruh kepemilikan media.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu komunikasi. Selain itu, juga bisa memberikan manfaat kepada studi kualitatif tentang bagaimana sebuah media mengonstruksi fakta korupsi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap lembaga penyiaran swasta Metro TV dan TV One untuk mampu menjaga independensi dalam setiap pemberitaan dan memprioritaskan kepentingan publik.

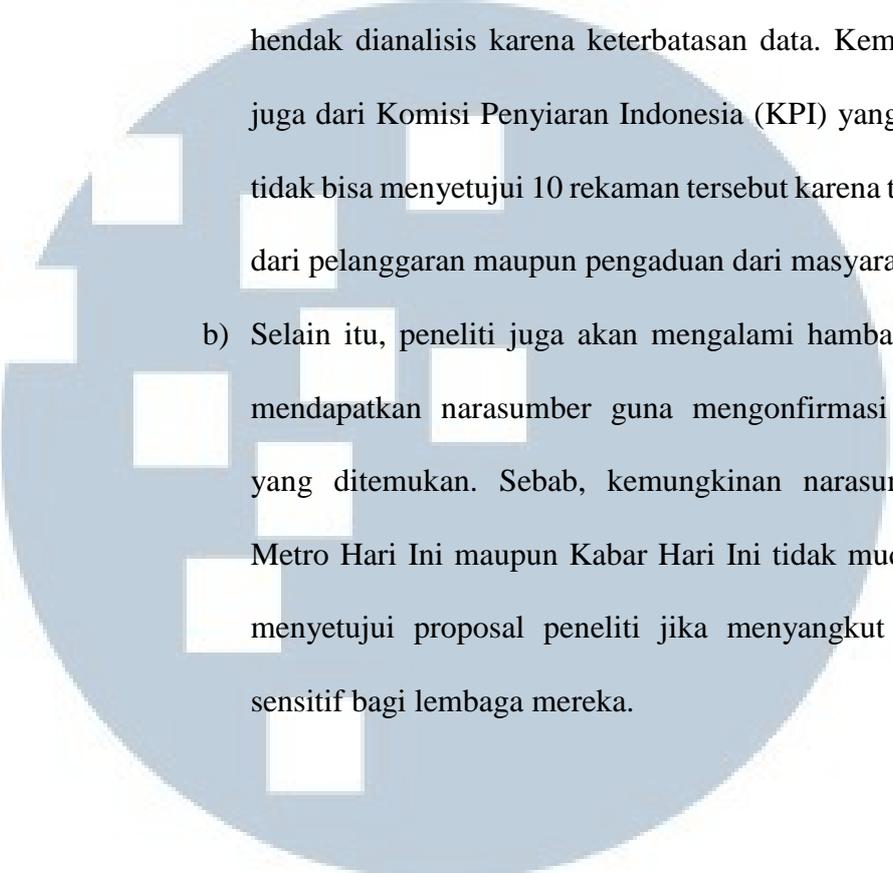
1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas untuk mengetahui afiliasi politik dalam media dan meningkatkan literasi membaca agar tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang memiliki kepentingan politik.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian ini, di antaranya :

- a) Peneliti mungkin akan mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan rekaman Metro Hari Ini dan Kabar Hari Ini sesuai dengan tanggal yang dimaksud. Sebab, Metro TV dan TV One mungkin tidak bisa memberikan 10 rekaman yang



hendak dianalisis karena keterbatasan data. Kemudian ada juga dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mungkin tidak bisa menyetujui 10 rekaman tersebut karena tergantung dari pelanggaran maupun pengaduan dari masyarakat.

- b) Selain itu, peneliti juga akan mengalami hambatan dalam mendapatkan narasumber guna mengonfirmasi data-data yang ditemukan. Sebab, kemungkinan narasumber dari Metro Hari Ini maupun Kabar Hari Ini tidak mudah dalam menyetujui proposal peneliti jika menyangkut hal yang sensitif bagi lembaga mereka.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA